

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENINGKATAN KEIMANAN
DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Oleh :

FRANS MAGNIS SUSENO SJ

Makalah Disampaikan Pada :

SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII
TEMA
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Diselenggarakan Oleh
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Denpasar, 14 -18 Juli 2003

SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KE-VIII,
DEP. KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA, DENPASAR, 15 Juli 2003

MANUSIA INDONESIA:
KE LUAR DARI KETERPURUKANNYA

oleh
Franz Magnis-Suseno SJ

Pengantar

Dalam makalah ini saya (1) akan menunjukkan segi-segi keterpurukan manusia Indonesia yang dalam pandangan saya paling menonjol, (2) mencoba sedikit menguraikan latar belakang keterpurukan itu. (3) mengajukan beberapa pertimbangan bagaimana kita bisa berusaha ke luar dari keterpurukan itu, untuk (4) menutup uraian dengan satu dua catatan tentang kualitas hukum yang perlu menunjang gerak ke luar dari keterpurukan.

1. Krisis masyarakat Indonesia

Bicara tentang krisis masyarakat kita, kita bisa menjadi bingung untuk memilih dari mana kita harus mulai. Sistem hukum dan peradilan sakit berat, perekonomian belum betul-betul pulih, struktur-struktur demokratis negara belum didukung oleh sebuah budaya demokratis, militer digerogeti pelbagai masalah serius dan belum betul-betul menemukan sosoknya di masa pasca Orde Baru. Dan seterusnya dan seterusnya.

Namun di sini saya akan memberi fokus pada tiga masalah yang meliputi masyarakat, yang kalau tidak diatasi bisa mengancam persatuan bangsa dan akhirnya bahkan eksistensi negara Republik Indonesia. Tiga masalah itu adalah (1) kecenderungan masyarakat untuk bertindak dengan kekerasan, (2) sektarianisme dan eksklusifisme, (3) korupsi dalam elit politik bangsa.

(1) Suasana kekerasan

Yang paling mencolok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah kecenderungan untuk menanggapi segala masalah, dan tantangan dengan kekerasan. Tersenggol sedikit di keramaian lalu-lintas dan orang langsung berkelahi, barangkali memakai pisau. Tawuran massal menjadi kejadian sehari-hari. Ucapan emosional bisa berakhir dengan pembunuhan. Kota-kota besar ditandai oleh para preman, pemalak dan perampok kasar. Terhadap mereka masyarakat bereaksi dengan kasar.

Yang sangat mengkhawatirkan adalah kecenderungan untuk bereaksi secara komunal. Seorang pemuda bertengkar dengan pemuda lain, dengan cepat seluruh kampung bisa terlibat. Orang lalu melakukan hal-hal yang sangat memalukan, seperti membakar rumah orang lain atau membunuh orang. Apabila kampung-kampung itu berciri etnik atau agama tertentu bisa terjadi perang antar suku atau agama.

Konflik etnis, seperti di Kalimantan atau keagamaan, seperti di Maluku dan Poso, sebenarnya lebih merupakan konflik komunal daripada konflik budaya, konflik ideologi, konflik agama. Tentu, apabila konflik sudah pecah, semua prasangka komunal yang selalu ada disedot menjadi minyak yang semakin membakar masyarakat.

Tentu saja, konflik-konflik itu sangat berbahaya. Kalau bangsa tidak lagi dapat menghayati nilai positif hidup bersama dengan saudaranya yang suku atau agamanya berbeda, bangsa akan habis. Tinggal kebencian-kebencian dan egoisme-egoisme masing-masing komunitas. Di Afrika, di kaukasus, dan di beberapa tempat lain kita dapat melihat ke mana komunalisme bisa membawa suatu masyarakat.

(2) Sektarianisme dan eksklusifisme

Sektarianisme dan eksklusifisme merupakan gejala lain daripada, misalnya, konflik antar umat beragama di Indonesia Timur (meskipun akhirnya hasilnya sama saja). Sektarianisme adalah istilah bagi sebuah sikap ideologis, sebuah ideologi, jadi sebuah cara berpikir. Maka sektarianisme secara primer bukan penyakit masyarakat luas, melainkan penyakit orang intelektual dan lebih-lebih semi-intelektual. Sektarianisme bisa fundamentalistik, bisa juga tidak. Fundamentalisme tentu selalu juga bersikap sektarianistik.

Dengan sektarianisme dimaksud anggapan dan sikap hidup bahwa hanya kelompokku sendiri adalah benar dan semua yang lain adalah salah. Kata itu dari kata "sekte", istilah di kalangan Kristen sendiri tentang kelompok Kristen eksklusif dengan ajaran Kekristenan sempit yang menganggap semua kelompok dan Gereja Kristen lain sebagai sudah sesat. Hanya kelompok kecil mereka sendiri yang akan diselamatkan. Sektarianisme mengandung ketidakmampuan untuk merelatifkan diri, untuk menemukan hal-hal baik dalam kelompok lain, untuk mau belajar dari orang/kelompok lain, untuk berwawasan terbuka tanpa prasangka.

Sektarianisme dengan sendirinya bersifat eksklusif. Semua yang tidak termasuk "sekte" saya dieklusikan dari kebenaran, dari keselamatan, dari harkat kemanusiaan, dari kasih sayang Ilahi.

Eksklusifisme adalah penyakit kaum agama (syukurlah, hanya sebagian agak kecil). Sikap eksklusif membuat orang membedakan antara kelompok sendiri yang benar dan yang lain-lain yang salah semua (dan kalau eksklusifisme itu religius, mereka yang "tereksklusi" dianggap akan masuk neraka semua). Kenyataan bahwa ada agama-agama dan aliran-aliran lain diabaikan. Kenyataan bahwa masyarakat bersifat plural senantiasa membuat mereka menjadi marah. Keseragaman adalah cita-cita mereka.

Mengapa eksklusifisme begitu berbahaya? Karena eksklusifisme membuat semua yang tidak seialiran tidak termasuk pemilik rumah bersama. Dengan lain kata: Eksklusifisme menyangkal dan membongkar persatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kebangsaannya bukan alami - berdasarkan satu bahasa, - melainkan historis dan etis. Historis karena hanya pengalaman sejarah bersama yang menjadikan kemajemukan komunitas, suku dan etnik-etnik itu menjadi satu bangsa, etis karena persatuannya terwujud dalam tekad bersama untuk mau bersama. Apabila ada satu pihak yang paling benar, yang meletakkan hukumnya pada semua, maka semua yang tidak seialiran atau sekomunitas merasa dikecualikan dari kesatuan bangsa. Kaum eksklusivis sendiri berpendapat bahwa tatanan yang mereka perjuangkan, dan seperlunya mau mereka paksa pada semua, adalah yang terbaik - akan tetapi yang lain-lain justru tidak sependapat. Itulah hakekat eksklusifisme. Eksklusifisme, karena itu, menggantikan konsensus dengan paksaan. Tetapi persatuan yang dipaksakan sudah bukan persatuan nasional, melainkan kolonial atau imperialistik.

Oleh karena itu sektarianisme dan eksklusifisme perlu dianggap, ancaman terbesar setiap bangsa yang majemuk.

(3) Korupsi elit politik

Bahwa korupsi merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa dan negara tidak dapat disangkal. Yang paling mengkhawatirkan bahwa korupsi itu tidak berasal dari bawah di mana orang barangkali memeluknya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari atas. Korupsi pertama-tama merupakan gejala elit.

Perlu korupsi itu disebut dan dikutuk dengan sekeras-kerasnya. Karena apabila 10 tahun mendatang negara ini - semoga tidak terjadi - sudah pecah ke dalam wilayah-wilayah para warlords yang saling berperang, semacam Konggoisasi, yang pertama-tama harus bertanggungjawab di depan sejarah, yang pertama-tama harus disebut seterang-terangnya sebagai pengkhianat bangsa Indonesia, adalah para elit yang korup itu.

Mengapa resim Pak Harto jatuh? Karena kebijakan ekonomi yang tidak tepat? Karena kesalahan konsepsional? Bukan. sebabnya resim Pak Harto jatuh adalah korupsi yang, bak pasukan rayap, menggerogoti ketahanan ekonomis, ketahanan sistem hukum, ketahanan moral dan akhirnya ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Tetapi korupsi tidak berkurang melainkan bertambah sejak Pak Harto jatuh. sesudah Sang Bapa di atas yang masih mampu mendisiplinkan para bawahan pergi, sifat bajingan para bawahannya semakin kelihatan. sekarang merekalah yang mau melayani diri, mereka mau memakai kesempatan yang barangkali hanya pendek untuk merampas kekayaan sebanyak mungkin agar mereka kemudian aman apabila bangsa ini kandas.

Gejalanya?

- Tiga presiden pasca Suharto bahkan tidak melihat bahwa ada masalah.
- Dalam gaya hidup mereka tidak memberikan contoh dan terlibat dalam pelbagai "bisnis" seperti mendadak membangun rumah mewah di daerah mewah dsb. - yang meragukan.
- DPR dan DPRD-DPRD terkena *money politics*. Dengan kata lain: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - yang memang tidak dipilih rakyat melainkan dipilih partai, dan partai-partai melanggengkan praktek itu - bisa dibeli dan jadi dibeli. Yang punya duit, dialah yang berkuasa di negara ini.
- Para gubernur, walikota, pejabat lain menyogok para anggota Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing dengan diberi hadiah seharga puluhan sampai ratusan juta rupiah - di atas fasilitas dan gaji para "wakil rakyat" yang sudah di luar proporsi. Tentu agar tidak menyabot korupsi pejabat itu. Misalnya saja, dengan hadiah yang diberikan seorang walikota kepada semua anggota dewannya, bisa dibeli 50 truk pengangkut sampah yang sangat dibutuhkan di daerahnya.
- Dan banyak kejadian lain. Memalukan luar biasa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat negara ini dipimpin aktif oleh orang yang sah dijatuhi hukuman, meski belum final, oleh pengadilan; bahwa jaksa agungnya tersangka resmi perkara korupsi, dst. dst.
- Tentu satu segi korupsi yang teramat mencemaskan adalah korupsi di aparat peradilan. Termasuk apa yang disebut "mafia peradilan". Itu pun sesuatu yang menggerogoti substansi kenegaraan karena menggerogoti negara hukum.

Kesan saya bahwa publik tidak menyadari, atau para penguasa eksekutif dan legislatif menutup-nutupi, betapa berbahaya korupsi elit itu. Bahayanya bahwa rakyat merasa dikhianati oleh mereka atas nama demokras. Di bawah Pak Harto resim masih otoritarian. Tetapi sekarang namanya demokrasi, namun mereka yang, dipilih, memandang keterpilihan mereka itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri secara pribadi. Saya mengulangi bahwa perbuatan dan contoh itu kriminal, busuk dan perbuatan pengkhianatan. Sedih nasib bangsa yang para pemimpinnya bermental *crooks*. Rakyat tentu akan bosan dengan demokrasi - seperti dia tidak percaya dengan demokrasi di tahun 50-an karena para politisi waktu itu hanya memikirkan partai mereka, padahal belum terkena korupsi seperti sekarang. Jadi situasi sekarang betul-betul gawat.

2. Latar Belakang Keterpurukan

Kalau kita mau ke luar dari keterpurukan itu, kita harus tahu apa yang menyebabkannya. Di sini saya tentu hanya dapat secara pendek ke arah ke mana, menurut hemat saya, kita harus mencari untuk kemudian merumuskan strategi untuk ke luar dari krisis nasional.

Latar belakang kekerasan dan konflik

Krisis masyarakat - kecenderungan untuk bersikap keras, beringas, brutal dan komunalistik berlatar belakang dua kenyataan. Yang pertama adalah penindasan di bawah Orde Baru, yang satunya komunalisme yang juga diperkuat oleh pemerintahan Orde Baru.

Di bawah Orde Baru keadaan rakyat kebanyakan sebenarnya membaik. Akan tetapi perbaikan itu seakan-akan dihapus dalam kesadaran masyarakat karena ketidakadilan dan penindasan-penindasan yang mereka alami. Semakin sering orang kecil menjadi korban pembangunan. Seribu kasus Kedung Ombo. Apabila orang protes, ia dituduh PKI atau "ekstrem kanan", dan karena tuduhan itu sangat berbahaya, rakyat diam. Dan semakin pahit dan dendam dalam hatinya. Mereka melihat hebohnya pembangunan, terutama dalam simbol-simbol kemewahan di kota-kota besar - dan mereka sendiri tetap miskin. Maka, selain menjadi kecewa dan marah, mereka juga masing-masing merasa bahwa "yang lain-lain" yang beruntung. Jadi mereka menjadi cemburu: Cemburu terhadap orang Tionghoa, cemburu terhadap suku pendatang atau suku aseli, cemburu terhadap "orang-orang atas", terhadap orang-orang bukan kampung, terhadap suku lain, terhadap umat beragama lain¹. Karena itu, orang semakin cenderung langsung bertindak dengan keras.

Sedangkan manusia Indonesia memang masih sangat erat hubungannya dengan "komunitasnya" Dengan desanya, dengan daerahnya, dengan sukunya, dengan umatnya. Maka konflik-konflik acak antar individu atau sekelompok orang cenderung dengan mudah melibatkan seluruh komunitas (dua preman berkelahi: yang satu Kristen, yang satu Islam, hal itu dengan mudah dapat memicu tawuran antara Kristen dan Islam, yang akhirnya bisa menjadi perang saudara).

Pada dasar masalah itu adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh orang kecil. Tak ada itu solidaritas bangsa, artinya solidaritas mereka di atas dengan yang di bawah, dan itu justru menghasilkan konflik yang horisontal.

¹ Kiranya adalah tiga lingkaran yang relevan untuk diperhatikan,

(1) Yang pertama adalah sebuah gejala kultural menyeluruh yang dialami oleh banyak bangsa di bumi kita sekarang. Masyarakat Indonesia sedang berada di tengah-tengah, proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca-tradisional. Bagi kelas-kelas menengah ke atas transformasi itu membuka cakrawala dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri dan oleh karena itu umumnya dihayati secara positif, bahkan antusias. Tetapi massa masyarakat terutama menghayati segi-segi negatif perubahan mendalam ini: Disorientasi karena nilai-nilai tradisional seakan-akan tidak terpakai lagi. Ancaman atas identitas, bahkan penghidupan mereka. Mobilitas baru dan perubahan dalam susunan hirarkis tradisional antar golongan dan kelompok yang mengancam juga. Dalam situasi ini primordialisme, dengan berbalik ke eksklusivitas kelompok semula, dengan sekaligus mencurigai "mereka" yang mengancam di luar, merupakan salah satu opsi,

(2) Gejala itu menjadi rawan karena ketertutupan sistem kekuasaan selama Orde Baru. Ruang politik (*political space*) ditutup, masyarakat menjadi objek pengaturan dari atas. Apabila terjadi konflik antar masyarakat sendiri atau dengan pemerintah - yang melalui lurah terwakili sampai ke tengah-tengah desa - konflik itu tidak dipecahkan secara rasional, argumentatif dan diskursif, melainkan dengan tekanan dan ancaman. Di mana ancaman paling kotor yang dipakai, dan memang merupakan ancaman, adalah "kamu PKI!" dan "kamu ekstrem kanan!". Sering masyarakat merasa menjadi korban pembangunan. Maka perasaan kecewa, sakit hati, dan perasaan diperlakukan dengan tidak adil terus terakumulasi dalam hati rakyat dan mudah menghasilkan perasaan curiga, iri dan dendam. Ketidakpercayaan sama sekali rakyat kepada aparat pemerintah, kecenderungan untuk memakai kekerasan untuk mencapai apa yang hak mereka, dan kesediaan untuk menjarah atau merusak apa yang termasuk "dunia sana", "dunia pembangunan" adalah buah kegagalan pengelolaan konflik selama Orde Baru.

(3) Sesudah Pak Harto berhenti dan diganti dengan pemerintah yang lemah, bersamaan dengan angkatan bersenjata yang bingung dan tidak percaya diri, segala frustrasi dan kekecewaan rakyat ini dapat muncul ke permukaan. Tanda-tanda disintegrasi sosial dan keambrokan *the rule of law* yang kita saksikan sekarang adalah akibat sejarah puluhan tahun kekerasan struktural itu.

Latar belakang eksklusifisme

Eksklusifisme sangat tergantung dari jenisnya. Eksklusifisme religius bisa berlatar belakang paham keagamaan yang sempit, jadi bersifat teologis. Eksklusifisme itu mulai di kalangan kaum intelektual yang sempit pandangannya, lalu menjadi masalah psikologis. Mereka merasa diri dipanggilan menjadi penjaga kemurnian ajaran, pembersih masyarakat dari apa saja yang “Maksiat”, merasa seakan-akan bertindak atas nama Tuhan sendiri dst.

Eksklusifisme itu baru akan meluas, apabila masyarakat merasa kecewa, bukan sekali-sekali, melainkan untuk waktu lama mengalami kekecewaan mendalam, serta segala janji perbaikan para politisi percuma. Lalu mereka akan terbuka terhadap hasutan-hasutan eksklusif.

Selain itu eksklusifisme juga hidup dari prasangka-prasangka antar kelompok, golongan, umat, suku, dsb, yang memang selalu ada. Dengan menonjolkan “mereka”, “kita” menjadi lebih bener, lebih suci, lebih hebat.

Sebagai gejala orang-orang intelektual eksklusifisme sering merupakan reaksi terhadap perubahan zaman yang tidak, dapat dicernakkan lagi. Berhadapan dengan perubahan-perubahan atas nama modernisasi yang sebagian besar tidak dapat ditolak, bak stomwals yang maju terus, yang dipercepat dan diperluas oleh globalisasi yang sebagian besar juga tidak dapat ditangkis, mereka tidak lagi mampu membuka wawasan dan mengambil sikap yang wajar, melainkan lari ke dalam tradisi yang diidolakan dan dilihat di luar konteks sejarah yang sebenarnya. Itulah, di kalangan kaum religius, reaksi fundamentalistik.

Korupsi elit

Mengapa elit politik kita sedemikian korup? Itu pun sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan singkat dan begitu saja. Maka saya hanya menunjuk pada beberapa faktor dan unsur yang kiranya perlu diperhatikan kalau kita mempertanyakan asal usul korupsi.

- Di jangka panjang, kiranya korupsi dapat dimengerti sebagai kembalinya mental "daulat tuanku" (Hatta), atau semangat "pamong praja" zaman kolonial. Sesudah semangat luhur perjuangan melawan Belanda demi kemerdekaan bangsa menguap, efek domestikasi kolonial Belanda terhadap elit-elit dalam negeri menyatakan diri kembali, dalam rangka sistem pemerintahan tidak langsung Belanda, yaitu bahwa elit disogok berpihak pada kaum penghisap Belanda, dengan diberi bagian dari penjarahan kekayaan dan hasil kerja rakyat, sehingga elit itu (ada yang sampai 1949) berpihak pada Belanda dan melawan rakyatnya sendiri atau sekurang-kurangnya tidak menghiraukan penderitaannya.
- Kecenderungan ini lalu meresap ke sebagian besar elit bangsa di bawah pemerintahan Orde Baru yang memang secara terencana dibangun dengan mengembalikan cara pemerintahan kolonial, kecuali, dan itu tambahan buruknya.

karena Jawa-sentrisme Orde Baru, Orde Baru memaksakan sistem pemerintahan lokal Jawa ke seluruh Nusantara (UU nr. 5/1979) hal mana merusak struktur-struktur sosial tradisional (hal mana terasa pada saat ada konflik-konflik komunal dan kekuatan-kekuatan tradisional tidak dapat diandalkan lagi), sesuatu yang tidak dibuat Belanda, karena mereka sadar bahwa keutuhan struktur-struktur tradisional menguntungkan mereka.

- Yang menentukan tentulah kurang atau tidak adanya sarana-sarana institusional untuk menindak korupsi. Korupsi akan meluas di semua negara di dunia (contoh: Jerman di bawah kaum Nazi) apabila penguasa tidak terkontrol. Di Indonesia alat-alat untuk membuat korupsi tidak menguntungkan (sistem baik menyebabkan *corruption doesn't pay*) hampir tidak ada. Situasi hukum anti-korupsi sangat lemah. Lama sekali media juga dibelenggu sehingga tidak mampu melakukan kontrol sosial (dalam negara-negara yang secara struktural kurang korup, yang beda bukan moralitas bangsa, melainkan bahwa ada dua faktor menentukan: Sistem auditing yang efektif, dan *investigative pers*).
- Tidak ada *political will* untuk menindak korupsi. BPK bisa saja menunjuk pada pelbagai penyelewengan dan ketidakberesan, akan tetapi karena tidak dapat mengambil tindakan, temuannya tidak mengigit.
- Tidak adanya *political will* itu sebagian karena elit di atas sudah korup. Dengan lain kata: kambing disuruh menjaga kebon, preman menjaga preman. Anggota DPR tidak mempunyai wawasan kepentingan umum, pemerintah “menikmati” menjadi penguasa, aparat (polisi, militer) hidup dari korupsi, berhubungan erat dengan kejahatan terorganisasi, menjadi penyelundup dan perusak lingkungan hidup, (hutan) terbesar dan mengayomi perdagangan narkoba.

Inilah, kalau mau, gambaran negara yang mengalami masalah serius betul.

3. Bagaiman Ke Luar Dari Rawa Krisis Itu?

Kiranya sudah jelas bahwa gejala-gejala krisis yang disebutkan diatas tak kurang merupakan ancaman bagi eksistensi negara Indonesia. Masalah yang menghantui bangsa Indonesia bersifat menyeluruh. Bangsa Indonesia sedang sakit dan yang diperlukan adalah penyembuhan yang menyeluruh.

Tindakan struktural pemerintah

Maka pertama saya menyebutkan saja, demi lengkapnya, beberapa kondisi yang harus diciptakan Pemerintah sebagai prasyarat agar masyarakat dapat bangun kembali. Tindakan-tindakan seperti itu, yang sudah sering dikemukakan, adalah :

1. Menetapkan kembali kekuatan hukum (*the rule of law*) di mana segenap pelanggaran undang-undang, baik individual maupun masal, selalu ditindak dengan tegas dan tak pernah dibiarkan, Di sini termasuk pengembalian perangkat yudikatif (kehakiman, pengadilan) yang bersih dan kompeten.

2. Membangun angkatan kepolisian dan angkatan bersenjata yang kompeten, profesional, tahu diri, bersemangat demokratis, tidak korup, tidak lagi terlibat premanisme, disiplin, bersemangat nasionalis.
3. Menciptakan kondisi-kondisi penyehatan kehidupan ekonomis dan mengarahkan pembangunan ekonomis yang oleh seluruh rakyat dapat dirasakan sebagai adil.
4. Bersama DPR dan MPR membangun kehidupan demokratis, termasuk mengembangkan sebuah budaya konflik dan sopan-santun demokratis.
5. Menegaskan secara meyakinkan bahwa segenap warga bangsa sama-sama menikmati kewajiban dan hak-hak sebagai warga negara dan manusia, jadi bahwa negara Indonesia adalah milik seluruh bangsa tanpa membedakan suku, agama, daerah dsb.
6. Melaksanakan *desentralisasi* pelaksanaan kekuasaan secara tertib dan profesional yang di satu pihak memberikan otonomi yang wajar kepada masing-masing satuan sosial-politik bangsa, di lain pihak menjamin persatuan dan sendi-sendi kehidupan bersama, atas dasar Pancasila.
7. Kecuali itu, pemerintah, harus memelopori pembaruan masyarakat dengan memancarkan visi positif tentang masa depan bangsa ke dalam masyarakat serta memancarkan sosok pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kalau pemerintah pasca reformasi memberi kesan sama korupnya dengan yang sebelumnya, masyarakat akan tenggelam dalam kekecewaan dan masa depan bangsa betul-betul dalam bahaya).

Namun unsur-unsur ini belum cukup. Atau, lebih tepat, masalahnya justru mengapa belum dilaksanakan. Dan di situ kita kembali ke tiga masalah dasar yang tadi saya sebutkan, yang memang perlu ditanggulangi apabila kita mau ke luar dari keterpurukan.

Beradab dan toleran

Mengenai kekerasan dalam masyarakat. Di situ perlu dibedakan antara pembawaan masyarakat yang diharapkan dan syarat pencapaiannya. Mengenai pembawaan masyarakat yang diharapkan, sering kita mendengar keluhan bahwa akhlak, moral dan etika masyarakat sudah buruk. Menurut saya keluhan itu tidak berguna, bahkan kadang-kadang hipokrit. Omong yang luhur-luhur menjadi tabir memburaman hal-hal yang sederhana.

Menurut saya lebih tepat kalau dikatakan: Dua sikap yang perlu dipelajari masyarakat adalah, pertama, kelakuan beradab, kedua, kemampuan untuk bertoleransi. Tak usah macam-macam, luhur-luhur, suci-suci. Yang *bottom line* yang perlu dicapai adalah kelakuan beradab, daripada kelakuan biadab. Itu saja. Pembawaan secara manusiawi paling dasar. Kemampuan untuk beradab yang membedakan manusia dari binatang. Jadi biar masyarakat kembali ke pembawaan yang secara tradisional tak pernah menjadi masalah: membawa diri selalu, dalam situasi apa pun secara beradab. Di situ saya juga melihat peran agama. Agama-agama omong banyak sekali. Tetapi kalau kelakuan beradab saja tidak dapat mereka tekankan, hipokrit belaka. Dengan lain kata, kalau agama-agama berfokus pada kelakuan beradab saja, sudah sangat bagus, yang lain-lain belakangan saja.

Yang kedua, toleransi, merupakan syarat mutlak kalau masyarakat majemuk mau hidup bersama dengan baik. Toleransi ya dalam arti mampu hidup bersama saudara dan saudari sebangsa yang bahasanya, agamanya, sukunya, adat-istiadatnya beda, Toleransi di satu pihak berarti jangan memaksakan diri sendiri, di lain pihak peka terhadap perasaan semua. Jadi jangan menindas yang lain, tetapi juga jangan memprovokasi yang lain. Toleransi dalam arti paling biasa, membiarkan orang lain sebagai orang lain, tidak bingung kalau berpapasan dengan orang lain, tidak terganggu dengan kehadiran orang lain, bahkan mampu untuk acuh-tak acuh terhadap orang lain dan kelompok orang lain².

Penataan masyarakat yang inklusif

Melawan tendensi-tendensi sektarian dan eksklusivistik negara dan masyarakat perlu ditata sedemikian rupa sehingga semua kelompok dan golongan dapat mengidentifikasi diri dengannya. Hanya kalau negara Indonesia merupakan rumah di mana semua komponen Indonesia yang majemuk dari Sabang sampai Merauke, merasa seperti di rumah sendiri, betul-betul ikut memilikinya, persatuan bangsa dapat kokoh.

Maka penataan konstitusional, legal dan sosial harus inklusif. Pluralitas harus dilihat sebagai aset, bukan sebagai sesuatu yang perlu dihilangkan (hal mana memang tidak mungkin dan kalau dicoba akan mengakhiri riwayat Indonesia sebagai satu negara). Indonesia hanya akan bersatu kalau semua bersedia menerima **pluralitas** yang merupakan realitas Indonesia. Karena itu, UUD, sistem hukum dan suasana kehidupan masyarakat harus **inklusif**.

Pengakuan terhadap pluralitas bangsa adalah **hakekat Pancasila**. Itulah aktualitas Pancasila yang sama sekali tidak menjadi buram atau usang karena penyalahgunaan Pancasila oleh resim Suharto. Hakekat Pancasila adalah konsensus nasional bahwa semua warga negara, tanpa membedakan menurut keyakinan beragama - dan secara implisit: tanpa membedakan menurut suku, pulau, daerah dsb., - sepenuhnya adalah warga negara, jadi sepenuhnya menikmati semua hak serta itu memikul semua kewajiban sebagai manusia dan warga negara. Dalam Pancasila pluralitas bangsa diakui serta ditegaskan keyakinan dan keharusan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang etis, adil dan beradab sebagaimana terungkap dalam lima sila Pancasila. Dengan lain kata, komitmen kembali kepada **Pancasila** merupakan syarat *survival* bangsa. Adalah tidak keliru bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 para pendiri Republik ini yang terdiri ada

² . 30 tahun lalu Erving Goffman (dikutip dari *Sznajder dlm Politik und Gesellschaft* 4/1999, 394) mengembangkan paham "*civil inattention*". Yang dimaksud adalah kelakuan orang-orang yang pada saat yang sama berada di tempat yang sama, tetapi tidak mempunyai urusan satu sama lain, misalnya di bis atau di toko swalayan. Yang dimaksud kemampuan untuk menjalankan urusan sendiri dalam kehadiran orang lain yang barangkali mempunyai pandangan, gaya hidup dan keyakinan-keyakinan religius dan politik yang sangat berbeda. Dalam masyarakat modern orang lain adalah urusan orang lain. Dalam situasi itu diperlukan "*civil inattention*" itu: "*Inattention*" dalam arti, meskipun orang itu lain, namun tidak perlu dia diberi perhatian. "Civil" atau "civilized" karena kita berlaku sopan terhadapnya kesopanan mana mempunyai fungsi untuk memberitahu kepadanya bahwa ia tidak perlu takut terhadap kita. Dalam masyarakat plural modern orang yang berbeda tidak lagi, seperti dalam masyarakat tradisional, secara otomatis dianggap lawan potensial (karena pandangan itu maka dalam masyarakat ada sopan santun luar biasa terhadap tamu: sopan santun tradisional itu pada hakekatnya sebuah mantra untuk meyakinkan diri bahwa orang asing yang sebenarnya dirasakan sebagai ancaman, bukan ancaman; dalam masyarakat modern tata krama sopan santun bisa seadanya. Karena toleransi atau "*civil inattention*" itu sudah biasa). Kemampuan untuk bersikap acuh tak acuh satu sama lain merupakan salah satu syarat keberhasilan masyarakat pluralistik.

orang-orang dengan latar belakang ideologis dan cita-cita politik berbeda, memutuskan mengesampingkan segala pertimbangan lain demi untuk menetapkan kenegaraan atas dasar lima sila Pancasila karena mereka yakin bahwa hanya dengan demikian wilayah Nusantara yang luas dapat tetap bersatu sebagai Indonesia.

Perang melawan korupsi

Kalau betul bahwa korupsi adalah masalah paling serius bangsa Indonesia, tepatnya, korupsi elit politik Indonesia, maka kita tidak akan ke luar dari keterpurukan kecuali pemerintah menyatakan perang melawan korupsi. Tentu, semua harus ikut dalam perang itu. Khususnya para ulama, kiai, pendeta, pastor, guru, ajar perlu menggerakkan perang melawan korupsi.

Akan tetapi, perang itu harus dimulai dari atas. Yudikatif harus dibersihkan tanpa ampun. Bahwa jaksa agung negara ini adalah orang yang secara resmi berstatus tersangka merupakan sebuah adalah intolerabel! Siapa yang bertanggungjawab atas hal itu? Bahwa badan legislatif, DPR, dipimpin oleh orang yang oleh pengadilan secara resmi divonis tindak pidana korupsi meskipun belum final - dan tidak dinonaktifkan sampai jelas ia bersalah atau tidak, juga merupakan sebuah skandal. Maka legislatif, mulai dari DPR, lalu ke DPRD harus membersihkan diri dari mental korup dan mata-duitan yang amat memalukan dan membahayakan masa depan demokrasi. Kita harus menuntut itu tanpa henti. Pembersihan diri masih mungkin. Sekaranglah saatnya untuk memulainya.

Yang paling skandal adalah sikap ayam-tentrem pemerintah yang bahkan tidak berusaha untuk memberi kesan bahwa merasa ada masalah. Pemerintahlah yang akhirnya menentukan. Pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan. Pemerintahlah yang harus menyatakan perang bukan hanya terhadap korupsi, melainkan terhadap segala praktek yang berbau korupsi. Pemerintah sendiri bukan hanya harus bersih, melainkan harus juga kelihatan bersih, beyond any doubt. Bahwa perang melawan korupsi sampai hari ini tidak dinyatakan oleh pemerintah, saya anggap kegagalan yang paling serius. Pemerintah dengan dukungan politik dan sosial sedemikian besar yang tidak memakai kesempatan positif seperti itu membuktikan inkompetensinya dan akan dalam sejarah pernah dianggap mengkhianati rakyat yang mau dibelanya.

Keadilan

Dosa korupsi bukan hanya bahwa negara digerogeti, melainkan korupsi adalah tindak ketidakadilan paling gawat. Korupsi berarti mereka yang di atas melayani diri dulu. Mereka mencemoohkan rakyat kecil. Omongan mereka tidak mutu karena mereka makan seenaknya dari meja yang sebetulnya bagi semua.

Jelaslah bahwa masalah di dasar semua masalah bangsa ini adalah ketidakadilan berkelanjutan, bersamaan dengan pengkhianatan para elit politik yang sudah mulai 50 tahun lalu. Ketidakadilanlah yang dirasakan orang kecil sejak begitu lama itulah yang membuat mereka menjadi keras, melatarbelakangi konflik-konflik berdarah, mendesak

mereka mencari solusi-solusi eksekutif. Dan korupsi elit yang melanjutkannya. Jadi di sinilah point yang menentukan.

4. Iman dan taqwa

Adalah baik dan terpuji bahwa masyarakat, dan tentu juga para elit, diharapkan beriman dan taqwa terhadap Tuhan. Dalam hal ini tidak perlu ada kontroversi. Percaya kepada Tuhan dan taat pada-Nya merupakan sikap manusia yang amat bagus dan aman.

Namun hal ini belum tentu betul mengenai omongan tentang iman dan taqwa. Jangan-jangan omongan imtaq menjadi tabir asap untuk menghindari dari menyebutkan masalah-masalah konkret yang ada. Kalau iman dan taqwa hanya berarti, misalnya untuk orang Katolik, pada hari Minggu ke Gereja dan menerima sakramen-sakramen yang wajib, tetapi tidak disertai kesadaran bahwa menerima sakramen tak ada gunanya apabila ia di luar gereja membawa diri secara biadab, keras, memfitnah, mengancam, membunuh, melakukan korupsi, bohong, egois, tidak toleran, malas, tak disiplin dsb., ia menipu diri (dan menurut ajaran Katolik menerima sakramen dan ke gereja hari minggu tidak akan menyelamatkannya diakhirat).

Jadi menambah, seperti dalam TOR seminar ini, di mana mana iman dan taqwa, itu hanya berguna apabila sikap-sikap yang memang diperlukan, ciri-ciri hukun, yang mau dikembangkan, dijadikan fokus secara eksplisit. Kalau tidak, kita menipu diri dan omongan tentang imtaq malah menjadi hipokrit. Iman dan taqwa harus merupakan sikap batin yang pertama-tama kelihatan dalam cara orang membawa diri terhadap orang lain: Menghormati identitasnya, tidak mengancamnya, adil, tidak menipunya, selalu membawa diri secara beradab, solidaritas nyata dengan mereka yang menderita, lintas golongan, jujur, rendah hati, mampu melihat kelemahannya sendiri. Orang macam itulah yang betul-betul beriman, betul-betul taqwa.

Maka saya mengusulkan agar bahasa yang luhur-luhur, tetapi mudah mengambang, dipergunakan secara hemat supaya tidak terkena inflasi, lalu malahan dianggap tidak lebih dari trik politik. Terlalu sayang untuk sikap-sikap seperti beriman dan taqwa yang sebenarnya mengungkapkan sikap paling dasar manusia terhadap Penciptanya.